




## Research Article

# Peran Publik Terhadap Kontribusi APBN

Ahmad Virman Haris<sup>1</sup>, Khusnuddin<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail: [240504210003@student.uin-malang.ac.id](mailto:240504210003@student.uin-malang.ac.id) 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail: [khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id](mailto:khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 25, 2025  
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 27, 2025  
Available online : December 7, 2025

**How to Cite:** Ahmad Virman Haris and Khusnuddin (2025) "Public Role in APBN Contributions", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1580–1586. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1807.

## Public Role in APBN Contributions

**Abstract.** The public's role in supporting the State Budget (APBN) is vital as one of the main sources of state revenue. The public contributes directly through tax payments, including income tax, value-added tax, and regional taxes, and indirectly through economic activities that broaden the state's revenue base. This article aims to examine the public's contribution to the APBN by highlighting aspects of tax awareness, economic participation, and supportive government policies. The research was conducted using qualitative descriptive analysis with secondary data from various reports and academic studies. The results show that increasing public contributions to the APBN depends on public education, simplification of tax administration processes, and public service innovations such as tax digitization. The conclusion of this article emphasizes that collaboration between the government and the public is crucial in ensuring fiscal sustainability and national development.

**Keywords:** State Budget, Public Contribution, Tax, Economic Participation, National Development.

**Abstrak.** Peran publik dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangatlah vital sebagai salah satu utama penerimaan negara. Publik berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak daerah, secara tidak langsung melalui aktivitas ekonomi yang memperluas basis penerimaan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi publik terhadap APBN dengan menyoroti aspek kesadaran pajak, partisipasi ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Penelitian dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai laporan dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kontribusi publik terhadap APBN bergantung pada edukasi Masyarakat, penyederhanaan proses administrasi pajak, serta inovasi layanan publik seperti digitalisasi pajak. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat sangatlah penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan Pembangunan nasional.

**Kata Kunci :** APBN, Kontribusi Publik, Pajak, Partisipasi Ekonomi, Pembangunan Nasional.

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategi sebagai instrumen dalam mewujudkan Pembangunan nasional. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendanai kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian. Melalui pengalokasian anggaran yang tepat, APBN mendukung sektor-sektor prioritas seperti Pendidikan-pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan negara, yang merupakan bagian penting APBN, Sebagian besar bersumber dari kontribusi Masyarakat, terutama melalui pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah menjadi tulang punggung pendapatan negara. Namun, tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak seperti rendahnya Tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak dikalangan Masyarakat, masih menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan potensi APBN<sup>1</sup>.

Selain itu, kebijakan inovatif seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menunjukkan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing regional, KEK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan basis pajak yang mendukung penerimaan negara<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan drive-thru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

<sup>2</sup> Makalew, V. N., et al. (2019). *Analisis kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap struktur perekonomian Sulawesi Utara*.

APBN juga memainkan peran penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi. Di masa krisis, APBN dapat menjadi alat untuk memberikan stimulasi ekonomi, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial<sup>3</sup>.

Dengan demikian, keberhasilan Pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan APBN, yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif Masyarakat. Edukasi public, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan layanan pajak menjadi Langkah kunci untuk memastikan keberlanjutan APBN dalam mendukung Pembangunan nasional.

Peran publik sebagai aktor utama dalam menciptakan utama dalam menciptakan penerimaan negara melalui pajak dan aktivitas ekonomi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sistem perpajakan, Masyarakat berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh publik, seperti konsumsi, investasi, dan produksi, juga internasional. Kontribusi ini menggambarkan hubungan era tantara pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan kemampuan negara untuk membiayai Pembangunan serta penyediaan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, literasi fiskal dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi perpajakan menjadi faktor penentu efektivitas peran publik dalam menciptakan penerimaan negara<sup>4</sup>.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kontribusi publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik melalui pajak maupun aktivitas ekonomi lainnya, serta mengidentifikasi strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat demi mendukung keberlanjutan fiskal dan Pembangunan nasional.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kontribusi publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengidentifikasikan strategi penguatan partisipasi Masyarakat. Metodologi ini dirancang untuk menganalisis data sekunder yang relevan dan menghubungkannya dengan peran publik dalam mendukung penerimaan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi langsung publik terhadap APBN

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara, menyumbang lebih dari 70% terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam beberapa tahun terakhir, Tingkat realisasi pajak Indonesia menunjukkan peningkatan

---

<sup>3</sup> Anwar, A. (2017). *Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa*. Jurnal *Economia*, 13(1), 79-94.

<sup>4</sup> Sutrisno Bawono, "Transparansi Fiskal dan Partisipasi Masyarakat dalam APBN," *Jurnal Keuangan Negara*, Vol. 12, No. 3 (2023): 48.

yang signifikan, namun belum mencapai potensi optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Tingkat literasi fiskal Masyarakat yang masih rendah, ketidakpercayaan terhadap transparansi pemerintah, dan maraknya penghindaran pajak<sup>5</sup>. Peran publik dalam membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud partisipasi dalam Pembangunan nasional. Studi juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dapat mendorong kesadaran Masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela<sup>6</sup>. Selain itu, Upaya pemerintah untuk memperkenalkan inovasi teknologi seperti e-Filing dan e-Biling telah mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga meningkatkan Tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

### Faktor pendukung dan penghambat peran public terhadap APBN

#### a) Faktor pendukung

##### 1) Kesadaran dan edukasi pajak

Tingginya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pajak menjadi faktor pendukung utama. Kampanye edukasi pajak yang dilakukan pemerintah seperti sosialisasi wajib pajak melalui platform digital telah meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat<sup>7</sup>.

##### 2) Inovasi Layanan Pajak

Transformasi digital dalam sistem perpajakan, seperti e-filing, e-billing, dan layanan drive-thru pajak kendaraan, mempermudah proses pembayaran pajak. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak<sup>8</sup>

##### 3) Pertumbuhan Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang meningkat, termasuk investasi dan konsumsi publik, memperluas basis pajak dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga memberikan efek multiplier yang positif<sup>9</sup>.

##### 4) Keterlibatan Publik dalam Pasar Modal

Partisipasi publik dalam investasi pasar modal, seperti saham dan obligasi, menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara melalui pajak atas keuntungan modal dan dividen<sup>10</sup>.

#### b. Faktor penghambat

##### 1) Rendahnya Kepatuhan Pajak

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya pajak atau merasa terbebani dengan sistem perpajakan yang dianggap rumit<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Anwar, A. (2017). *Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa*. Jurnal *Economia*, 13(1), 79-94.

<sup>8</sup> Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan drive-thru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

<sup>9</sup> Makalew, V. N., et al. (2019). *Analisis kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap struktur perekonomian Sulawesi Utara*.

<sup>10</sup> Zuraidah, E. (2019). *Kontribusi agroindustri kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR*.

<sup>11</sup> Hutahaean, H., et al. (2021). *Kontribusi PAK dalam keluarga terhadap pembentukan karakter siswa*.

2) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Ketidapercayaan terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak menjadi hambatan besar. Publik mengharapkan transparansi lebih dalam alokasi dan penggunaan dana pajak untuk memastikan manfaat langsung bagi Masyarakat<sup>12</sup>.

3) Hambatan Administrasi dan Infrastruktur

Di beberapa daerah, terbatasnya akses layanan pajak dan infrastruktur administrasi menjadi kendala. Wilayah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan modern<sup>13</sup>.

4) Ketidakadilan Fiskal

Ketimpangan dalam pengenaan pajak, di mana sebagian kelompok masyarakat merasa lebih terbebani dibandingkan lainnya, dapat memengaruhi partisipasi publik secara keseluruhan. Kebijakan yang kurang inklusif ini memicu resistensi terhadap pembayaran pajak<sup>14</sup>.

### Strategi untuk Meningkatkan Peran Publik terhadap APBN

a. Edukasi Pajak secara Masif

Salah satu Langkah utama untuk meningkatkan peran public terhadap APBN adalah dengan memberikan edukasi yang massif tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi Pembangunan nasional. Kampanye seperti Tax Goes to School dan Tax Awareness dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka melalui pajak<sup>15</sup>.

b. Digitalisasi Layanan Pajak

Implementasi teknologi dalam sistem perpajakan, seperti e-filing, e-billing, dan layanan pajak berbasis aplikasi, mempermudah proses pembayaran pajak, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Contohnya adalah layanan pajak kendaraan bermotor drive-thru yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat<sup>16</sup>.

c. Inisiatif Kebijakan Fiskal Inklusif

Memberikan insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah (UKM) atau penghapusan denda bagi wajib pajak tertentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. Kebijakan seperti ini tidak hanya mendorong kepatuhan pajak tetapi juga memperluas basis pajak<sup>17</sup>.

d. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Pajak

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi pengelolaan pajak. Publik perlu melihat bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan

---

<sup>12</sup> Pratiwi, S. O. (2019). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan*.

<sup>13</sup> Siregar, S. F. (2015). *Kontribusi kit praktikum kimia skala kecil terhadap tugas guru kimia*.

<sup>14</sup> Batu Bara, F. M. (2018). *Kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur*.

<sup>15</sup> Anwar, A. (2017). *Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa*. *Jurnal Economia*, 13(1), 79-94.

<sup>16</sup> Waqidah, L. R. (2017). *Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan drive-thru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

<sup>17</sup> Pratiwi, S. O. (2019). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan*.

untuk proyek-proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Misalnya, laporan rinci penggunaan pajak yang mudah diakses masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik<sup>18</sup>.

e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan peran publik dalam APBN. Dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang investasi, KEK mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan pajak tambahan melalui pajak penghasilan, pajak barang/jasa, dan lainnya<sup>19</sup>.

f. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pelatihan dan kampanye kesadaran pajak. Pendekatan kolaboratif ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperkuat partisipasi publik<sup>20</sup>.

g. Peningkatan infrastruktur Layanan Pajak Daerah

Memperluas akses layanan pajak ke wilayah terpencil melalui pembangunan kantor pajak keliling atau platform digital berbasis komunitas. Hal ini dapat mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah terpencil<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Peran publik dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dan dapat dilihat melalui kontribusi langsung seperti pembayaran pajak dan kontribusi tidak langsung melalui aktivitas ekonomi. Pajak, sebagai komponen utama penerimaan negara, memiliki potensi besar namun belum dioptimalkan sepenuhnya akibat kendala seperti rendahnya literasi fiskal, kurangnya kepercayaan terhadap transparansi pemerintah, serta sistem perpajakan yang dianggap rumit.

Beberapa faktor mendukung peran publik terhadap APBN, seperti peningkatan kesadaran dan edukasi pajak, inovasi layanan perpajakan berbasis digital, pertumbuhan ekonomi, dan keterlibatan publik dalam pasar modal. Namun, masih ada sejumlah hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan persepsi ketidakadilan fiskal.

Untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan peran publik terhadap APBN, diperlukan strategi yang terintegrasi, seperti edukasi pajak secara masif, digitalisasi layanan pajak, kebijakan fiskal yang inklusif, transparansi pengelolaan pajak, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Upaya ini juga perlu dilengkapi dengan peningkatan akses infrastruktur layanan pajak di daerah.

---

<sup>18</sup> Hutahaean, H., et al. (2021). *Kontribusi PAK dalam keluarga terhadap pembentukan karakter siswa*

<sup>19</sup> Makalew, V. N., et al. (2019). *Analisis kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap struktur perekonomian Sulawesi Utara*.

<sup>20</sup> Zuraidah, E. (2019). *Kontribusi agroindustri kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR*.

<sup>21</sup> Siregar, S. F. (2015). *Kontribusi kit praktikum kimia skala kecil terhadap tugas guru kimia*

Dengan mengoptimalkan dukungan dan mengatasi hambatan tersebut, pemerintah dapat memperkuat penerimaan negara melalui APBN, sehingga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. (2017). Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. *Jurnal Economia*, 13(1), 79-94.
- Batu Bara, F. M. (2018). Kontribusi PDRB subsektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur.
- Hutahaean, H., et al. (2021). Kontribusi PAK dalam keluarga terhadap pembentukan karakter siswa
- Makalew, V. N., et al. (2019). Analisis kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap struktur perekonomian Sulawesi Utara.
- Pratiwi, S. O. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.
- Siregar, S. F. (2015). Kontribusi kit praktikum kimia skala kecil terhadap tugas guru kimia
- Sutrisno Bawono, "Transparansi Fiskal dan Partisipasi Masyarakat dalam APBN," *Jurnal Keuangan Negara*, Vol. 12, No. 3 (2023): 48.
- Waqidah, L. R. (2017). Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan drive-thru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Zuraidah, E. (2019). Kontribusi agroindustri kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR.